



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Mei 2018

Halaman: 19

PAKET KESETARAAN

PKBM Harus Tombok Biaya Ujian

JOGJA—Ujian Nasional Berbasis Komputer Paket Kesetaraan (UNBK-PK) yang kali pertama digelar pada 2018 tak luput dari kendala. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Jogja mengeluhkan biaya yang harus ditanggung PKBM dalam mendukung pelaksanaan UNBK-PK.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Ketua Forum Komunikasi DPD PKBM Kota Jogja Eko Ratmoko menjelaskan, PKBM harus menanggung biaya pelaksanaan UNBK dengan rata-rata mengeluarkan Rp50.000 per siswa untuk Paket B dan Rp35.000 untuk Paket C.

- ▶ PKBM terpaksa harus menomboki anggaran itu karena tidak diperbolehkan memungut biaya dari warga belajar.
- ▶ Biaya tersebut antara lain untuk konsumsi, transportasi serta sejumlah honorarium.

PKBM terpaksa harus menomboki anggaran itu karena tidak diperbolehkan memungut biaya dari warga belajar. Pihaknya tidak memungkinkan untuk tidak mengeluarkan dana, karena pelaksanaan UNBK menumpang di sekolah lain.

"Kami dari PKBM kan ibaratnya minta tolong di sekolah formal, masi minta tolong ada proktor, teknis, pengawas kita diam saja kan enggak enak. Akhirnya diputuskan kami PKBM Kota Jogja masing-masing menanggung per peserta. Kalau [menurut] Dinas [Pendidikan] ya tidak boleh menarik biaya, tetapi di lapangan faktanya biaya itu mau tidak mau harus ada," ungkapnya kepada *Harian Jogja*, Jumat (11/5).

Ia menambahkan, biaya tersebut antara lain untuk konsumsi, transportasi serta sejumlah honorarium. Khusus untuk PKBM yang mendapatkan dana biaya operasional pendidikan (BOP) Kota Jogja, anggaran UNBK-PK bisa diambilkan dari pos tersebut.

Namun BOP hanya bisa didapatkan bagi PKBM yang sudah terakreditasi yang jumlahnya di Kota Jogja hanya empat PKBM. PKBM yang belum mendapatkan BOP menomboki dengan anggaran yang lebih besar lagi dengan menyesuaikan jumlah warga belajar yang mengikuti UNBK.

"UNBK-PK ini jelas sangat dikeluhkan para pengelola, permasalahannya kan sangat dipaksakan oleh Pusat, padahal sarana prasarana tidak ada, kami harus menumpang sementara pusat tidak secara khusus memfasilitasi," terang dia.

Pada UN tahun sebelumnya yang digelar secara manual, tidak mengeluarkan anggaran. Karena bisa dilaksanakan di lembaga masing-masing. Berbeda dengan UNBK, karena harus menumpang maka banyak pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan.

Eko mengatakan, PKBM di tempatnya mengeluarkan Rp980.000 untuk 28 warga belajar Paket C dan Rp700.000 untuk Paket B dalam pelaksanaan UNBK-PK 2018.

"Baru kali ini, PKBM gelar ujian harus keluarkan dana yang tidak sefikit. Nanti saat UN Susulan juga lebih swadaya lagi harus mengeluarkan anggaran karena itu di luar BOP malahan," tegasnya.

Terkait keluhan ini, Forum Komunikasi DPW PKBM DIY akan menyampaikan persoalan tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud. "Harapannya Pusat bisa menanggung seluruh biaya," ucap dia.

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
Pit. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005